

**ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH PADA
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2019**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**SUCI RAHMADHANI
2017/17133096**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH PADA
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2019**


Nama : Suci Rahmadhani
Nim : 17133096
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui oleh
Ketua Prodi



Halkadri Fitra, SE,MM,AK,CA
NIP.198008009 201012 1 003

Padang, Juli 2020
Disetujui oleh
Pembimbing



Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc
NIDN.0010019103

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


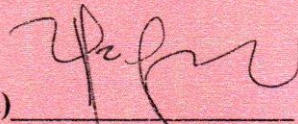
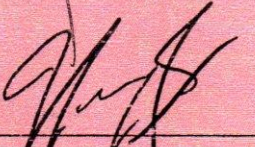
**ANALISIS KEMANDIRIAN DAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH PADA
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016-2019**

Nama : Suci Rahmadhani
Nim : 17133096
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2020

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	(Ketua) 
2. Halkadri Fitra, SE, MM,Ak, CA	(Anggota) 
3. Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	(Anggota) 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suci Rahmadhani
Nim/Tahun Masuk : 2017/17133096
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Dalam/18 Desember 1998
Keahlian : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Situjuh Bandar Dalam, Kec. Situjuh Limo Nagari,
Kab. Lima Puluh Kota
Judul Tugas Akhir : Analisis Kemandirian dan ketergantungan keuangan
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada
kabupaten tanah datar tahun 2016-2019

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan Akademik baik si Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2020
Saya yang menyatakan



Suci Rahmadhani
NIM. 17133096

ABSTRAK

Suci Rahmadhani : Analisis Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Pada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019

Pembimbing : Dian Fitria Handayani, S.E, M.Sc

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (1) dokumentasi yaitu berupa laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, (2) studi kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam sumber seperti buku, parmendagri dan dokumen lainnya. Data yang diteliti yaitu data Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2019, data Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2016-2019, data Realisasi Pinjaman tahun 2016-2019, data Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2016-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019 masih berkisar antara 0 - 25% sehingga dikategorikan kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali, (2) Rata-rata ketergantungan keuangan daerah kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019 dengan skala interval >50% dengan kriteria resiko ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Kemandirian Dan Ketergantungan Keuangan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Pada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019”**.

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Salallahu ‘alaihi Wassalam yang telah memperjuangkan Dunia yang dahulunya dari zaman kejahiliaan menjadi dunia yang penuh dengan ilmu Pengetahuan seperti sekarang ini adanya.

Tugas Akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis Menyadari bahwa Tugas Akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan limpahan dan karunia-Nya lah tugas akhir ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar.
2. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga atas doa dan kasih sayangnya serta memberikan semangat yang tidak

pernah putus dalam memberikan dukungan lahir dan batin dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.

3. Pimpinan, staf dan karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan izin dan bantuan selama penulis melakukan kegiatan Magang.
4. Dian Fitria Handayani, S.E, M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dari awal semester sampai dengan penyusunan tugas akhir hingga selesai.
5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Halkadri Fitra, SE MM.Ak selaku Ketua Jurusan D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Seluruh Dosen Pengajar Jurusan D III Akuntansi FE UNP yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Orang yang selalu mendengar keluh kesah, memberikan semangat dan motivasi secara materil maupun moril (Yadri Ys), dan teman grub Squad (Sri Andriyani, Vivin Fatihah).
9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang telah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan dalam menyusun Tugas Akhir sampai selesai.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tugas akhir.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan Tugas Akhir ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Payakumbuh, 2020

Suci Rahmadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	13
B. Kinerja Keuangan Daerah	14
1. Keuangan Daerah	14
2. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).....	15
3. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	17
4. Kinerja Keuangan.....	17
C. Pengertian Laporan Keuangan	18
D. Tujuan Laporan Keuangan.....	19
E. Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	27
1. Rasio Ketergantungan	29
2. Rasio Kemandirian.....	30

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Rancangan Penelitian	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi	37
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	37
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	40
3. Struktur Organisasi	40
4. Bidang Usaha/Bagian.....	42
B. Pembahasan.....	48
1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	49
2. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Total Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016-2019	8
Table 2	Kriteria Penilaian Resiko Ketergantungan Keuangan Daerah.....	30
Table 3	Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	31
Table 4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon	39
Table 5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Table 6	Distribusi Pegawai Berdasarkan Bidang.....	39
Table 7	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019	49
Table 8	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019	50

DAFTAR GAMBAR

Gambatr 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	41
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan dampak reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah, dimana pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan di dukung oleh dana perimbangan antara pusat dan daerah. Hal ini menuntut pemerintahan daerah untuk lebih meningkatkan sumber-sumber penerimaan guna meningkatkan pendapatan daerah. Otonomi membuka kesempatan bagi daerah untuk mengeluarkan segala potensinya secara optimal sehingga kemandirian daerah pun dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat terwujud. Artinya, Daerah dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah. Tujuan lain dengan adanya otonomi daerah adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Apabila daerah sudah mampu mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alamnya secara optimal, maka bisa dikatakan peranan pemerintah pusat semakin berkurang karena daerah yang bersangkutan mampu melaksanakan urusan otonomi tanpa campur tangan pemerintah pusat dan sudah dapat membiayai urusan pemerintah daerah itu sendiri.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali semaksimal mungkin sumber-sumber PAD. Karena semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintah daerah memiliki sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sehingga daerah tersebut mampu untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan bagi

daerah dalam tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah. Otonomi Daerah dapat melaksanakan wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk penyelenggaraan pembangunan suatu daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Pembangunan daerah adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomi, yang pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Maka pelaksanaan pembangunan tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang dalam pengelolaan keuangan masih timbul masalah, hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik serta juga merupakan tuntutan reformasi. Melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No 33 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan penuh pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang

dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Menurut Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur berdasarkan jumlah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Secara umum bantuan yang berasal dari luar PAD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pendapatan yang berasal dari luar PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah

daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Dengan adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien khususnya pendapatan asli daerah sendiri yang merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (Andirfa, 2016) salah satu instrument untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dan disahkan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang

meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Pengukuran Kinerja Keuangan dapat diukur berdasarkan bagaimana ketergantungan daerah terhadap total pendapatan daerah.

Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu Badan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat . Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Rasio Kemandirian Daerah melihat perbandingan antara sumber pendapatan internal daerah terhadap sumber dana eskternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan

pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota) semakin rendah. Apabila semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan komponen utama PAD. Rasio kemandirian keuangan yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah juga semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan daerah ini maka semakin semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat atau pemerintahan provinsi. Hal ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah demikian pula sebaliknya. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta dana transfer terhadap total pendapatan.

Keberhasilan suatu daerah terlihat dari penerimaan pendapatan asli daerah meningkat tiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang membaik sehingga kemandirian suatu daerah khususnya kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari berapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka semakin kecil

ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat. PAD tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan atau pinjaman tetapi juga dari potensi daerah itu sendiri. Berikut ini Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Total Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun Anggaran 2016-2019

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2016	1,188,763,795,259.84	118,971,143,693.84	1,062,269,282,015.00	7,523,369,551.00
2017	1,224,559,427,709.56	172,812,022,623.56	1,047,455,556,300.00	4,291,848,786.00
2018	1,230,335,931,942.65	115,914,187,914.65	1,069,760,679,524.00	44,661,064,504.00
2019	1,339,705,948,547.89	129,785,828,001.89	1,157,151,619,891.00	52,768,500,655.00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Total Pendapatan Daerah pada Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan yang sangat drastis, dan ditahun 2019 mengalami kenaikan lagi. Pada pendapatan transfer pada Kabupaten Tanah Datar mengalami Fluktuasi, dan penurunan terjadi di tahun 2017 dan 2019. Namun dari data diatas belum menggambarkan bagaimana rasio kemandirian dan rasio ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016-2019, apakah rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah sudah dapat dijalankan secara optimal serta bagaimana kriteria penilaian kemampuan

keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah.

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan jelas kita hanya dapat melihat atau mengetahui kondisi keuangan suatu pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan pada kabupaten/kota. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah/kota akan menggambarkan kinerjanya. Namun, dalam menggambarkan kinerja keuangan daerah tidak hanya dilihat dari jumlah saja tetapi dilihat dari persentase perbandingan antara sumber pendapatan internal daerah terhadap pendapatan eksternal. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah yang dilakukan dengan cara pendapatan asli daerah dibagi dengan transfer ditambah pinjaman. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana ketergantungan keuangan daerah tersebut dengan membandingkan pendapatan transfer dengan pendapatan daerah yang disebut rasio ketergantungan. Dengan melakukan perbandingan tersebut, dapat dilihat kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar apakah rasio kemandirian sudah memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan tingkat ketergantungan keuangan Daerah yang rendah, apakah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar sudah berhasil memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah yang ada serta bagaimana kriteria penilaian kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan analisis kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2016-2019, yang berfungsi untuk

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan-pendapatan daerah untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah yang lebih optimal atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas agar dapat mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasi oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan PAD.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengangkat judul yang membahas tentang: **“Analisis Ketergantungan dan Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah Pada Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah hal ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2019 berdasarkan analisis kemandiriannya?
2. Bagaimana pola hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019?
3. Bagaimana ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan daerah kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019?
4. Bagaimana kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud:

1. Untuk menganalisa kinerja pemerintahan kabupaten Tanah Datar berdasarkan rasio kemandirian daerah selama kurun waktu 4 tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui pola hubungan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu 4 tahun terakhir
3. Untuk menganalisa ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan daerah kabupaten Tanah selama kurun waktu 4 tahun terakhir.
4. Untuk mengetahui kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten Tanah Datar selama 4 tahun terakhir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat memperluas pengetahuan dan wawasan di bidang kinerja keuangan daerah khususnya ketergantungan daerah terhadap pendapatan daerah dan dapat mengaplikasikannya dari bangku kuliah kedalam dunia kerja.

2. Bagi Instansi Pemerintah Kabuapten Tanah Datar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan masukan dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang lebih optimal, agar hasilnya yang dicapai sesuai target yang diharapkan.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan menambah wawasan tentang kinerja pemeritahan daerah kabupaten Tanah Datar khususnya ketergantungan keuangan daerah dan dapat dijadikan salah satu referensi bagi penulis berikutnya yang membahas topik yang sama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019 memiliki rata-rata 12% yang masih berkisar antara 0-25%, sehingga pola hubungan yang terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yaitu instruktif artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Jadi, Pemerintah Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.
2. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2019 masih sangat tinggi dengan rata-rata 87%, dengan kriteria penilaian rasio yang berada pada angka diatas 50% berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah daerah dikategorikan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan peranan Pemerintah Daerah semakin berkurang dan masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar belum mampu untuk menutupi semua biaya yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pendapatan Daerah yang ada.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan dalam membayar pajak, retribusi daerah, meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Perlu memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tanah Datar 2016-2019*.
- Deddi Nordiawan, I. S. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Farid dan Siswanto (2011:2). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fitra, Halkadri 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Fe UNP.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi 2014. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Halim, Abdul 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irham Fahmi (2012:22). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Kusufi, A. H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi, (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LIPP STIM YKPN
- Mardiasmo, (2002). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmom, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Pemerintahan, K. S. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudiono, (2014). *Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Raih Asa
- Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah